Ketimpangan Kesejahteraan Antara Papua Jawa di Era Jokowi

Asriati[1], Abd. Rahim[2], Andi Samsir[3], Regina Murni[4], Irwandi[5]
[12345]Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Asriatile@gmail.com; abd.rahim@unm.ac.id; syamsir_fe03unm@yahoo.com; regina@unm.ac.id; irwandi@unm.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perbandingan ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah antara Papua-Jawa di Era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terhitung pada tahun 2014 sampai 2023. Pada penelitian ini menjelaskan terdapat dua variabel independent yang menjadi tolak ukur ketimpangan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan empat sampel dari 8 populasi. Teknis analisis data yang dipakai yaitu uji asumsi klasik, data panel dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah antara Provinsi Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan Inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah antara Provinsi Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan kategori Indeks Williamson (IW), semua provinsi yang dianalisis yaitu Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masuk dalam kategori ketimpangan tinggi, dengan nilai IW antara 0,5176 (Papua), 0,6504 (Jawa Tengah), 0,7059 Jawa Barat dan 0,9714 (Jawa Timur). Papua menunjukkan ketimpangan yang paling rendah di antara provinsi tersebut, sedangkan Jawa Timur memiliki nilai tertinggi, meskipun semuanya mencerminkan ketimpangan yang tidak merata.

Kata kunci: Inflasi, IPM, Ketimpangan Wilayah

WELFARE INEQUALITY BETWEEN PAPUA AND JAVA IN THE JOKOWI ERA

Abstract: The objective of this research is to analyze regional disparities occurring in Indonesia and to examine the factors influencing these disparities between Papua and Java during the presidency of Joko Widodo, from 2014 to 2023. This study identifies two independent variables as benchmarks for measuring inequality: the Human Development Index (HDI) and Inflation. The research employs a quantitative analysis method with four samples drawn from a population of eight. The data analysis techniques used include classical assumption tests, panel data analysis, and hypothesis testing. The results indicate that the HDI has a significant impact on regional disparities among the provinces of Papua, West Java, East Java, and Central Java. Conversely, inflation does not have a significant effect on regional disparities in these provinces. Based on the categories of the Williamson Index (IW), all analyzed provinces—Papua, West Java, Central Java, and East Java—fall into the high inequality category, with IW values ranging from 0.5176 (Papua), 0.6504 (Central Java), 0.7059 (West Java), to 0.9714 (East Java). Papua exhibits the lowest inequality among these provinces, while East Java has the highest value, indicating that all provinces reflect significant income inequality.

Kata kunci : Inflation, HDI, Regional Disparities

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia masih kerap dikaitkan dengan persoalan ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan yang terjadi dapat menjadi timbulnya sekat antar satu daerah dengan daerah yang lainnya. Terutama antara daerah dan pusat seperti Jawa dan Papua. Indonesia terus berupaya untuk meratakan kesejahteraan di seluruh titik negara. Namun karena adanya beberapa masalah yang dihadapkan kepada pemerintah sehingga ketimpangan antar wilayah masih menjadi *boomerang* hingga saat ini (Anis Kurnianingsih, Sudati Nur Sarfiah, 2019). Masalah ketimpangan tersebut bukan hanya akhir-akhir ini saja terjadi, bahkan sudah terjadi pada era-era pemerintahan sebelumnya. Menurut Wilkinson dan Picket (Liebig, 2012), dampak ketimpangan bukan hanya mengarah pada perekonomiann tetapi juga berdampak bagi beberapa

permasalahan sosial dan kesehatan, seperti kriminalitas dan kekerasan yang meningkat, gangguan mental dan depresi, kenakalan remaja, meningkatnya angka putus sekolah dan modal sosial yang lebih buruk (masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menjalin kerjasama untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama). UUD 1945 menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, yang berdasar kepada prinsip nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini kemudian diwujudkan dalam berbagai ketentuan di dalam batang tubuh UUD 1945, khususnya pada pasal-pasal yang terkait dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara itu, Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dalam bidang ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 (Nursaid, 2020).

Pada era pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami penurunan kesejahteraan dalam premis pertumbuhan berkualitas, pemerataan ekonomi perlu satu sudut pandang dengan kualitas pemerataan dan kualitas hidup yang lain seperti perbaikan tingkat Pendidikan, Kesehatan, lingkungan hidup, demokrasi dan kualitas kelembagaan. Walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam fluktuasi tertentu, namun penting untuk memperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat karena kesenjangan dan akses kepada sumber daya masih menjadi masalah. Pemerintah kini mengupayakan meningkatkan kesejahteraan di Papua sehingga setara dengan pulau Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2017 terkait penyelesaian dan percepatan Pembangunan Kesejahteraan semua Provinsi di Papua. Kajian ini menemukan tata kelola dan pendanaan yang belum optimal dalam layanan pendidikan di wilayah Papua (Agus Irianto Sumule et al., 2022).

Pada penelitian ini menjelaskan terdapat dua faktor yang menjadi tolak ukur kesejahteraan yaitu yang pertama Indeks Pembangunan Manusia-nya (IPM). Mahbub ul Haq berpendapat bahwa dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif yang dikembangkan sebagai alternatif pengukuran yang mencakup tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak melalui Indeks Pembangunan Manusia (Emmanuel Sujatmoko, 2014).

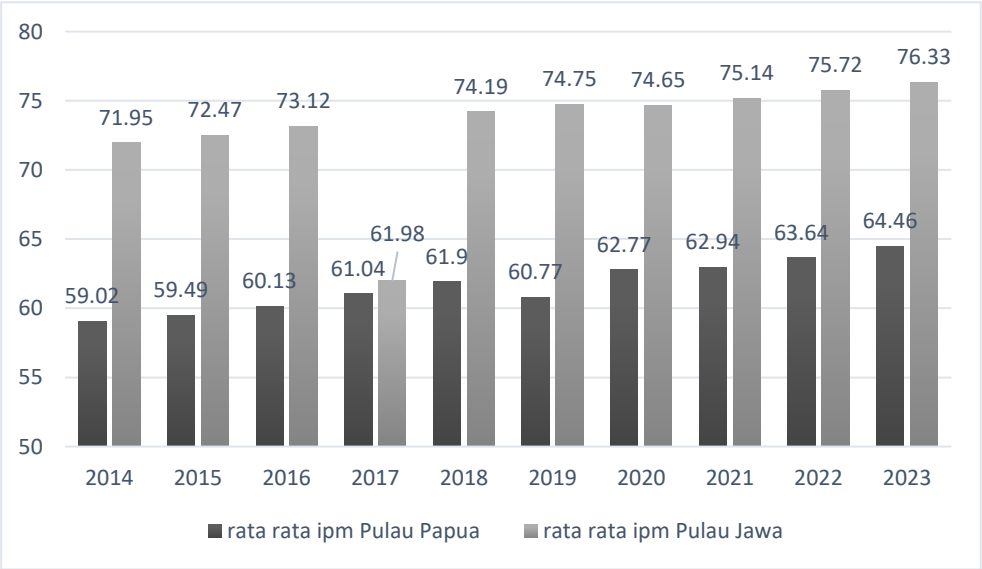

Gambar 1. Rata-rata IPM Pulau Jawa dan Papua 2014-2023

Suatu daerah dengan IPM yang rendah cenderung menghadapi tantangan pembangunan manusia yang besar. Sebaliknya, wilayah dengan IPM tinggi menunjukkan kondisi pembangunan manusia yang baik, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Pulau Papua dan Pulau Jawa menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat pembangunan sosial dan ekonomi. Berdasarkan data yang tersedia, rata-rata IPM Pulau Papua berkisar antara 59.02 hingga 64.46, sementara Pulau Jawa menunjukkan angka yang lebih tinggi, berkisar antara 71.95 hingga 76.33.

Perbedaan ini mencerminkan disparitas dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Pulau Jawa, sebagai pulau dengan populasi yang lebih besar dan infrastruktur yang lebih baik, memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan IPM. Di sisi lain, Pulau Papua menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan sumber daya yang lebih terbatas, yang mengakibatkan nilai IPM yang lebih rendah (Muhammed Wahed, Sishadiyati, 2021). Meskipun terdapat tren peningkatan IPM di kedua pulau, laju pertumbuhan IPM Papua yang lebih lambat dibandingkan Jawa menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan yang fokus pada daerah-daerah yang kurang berkembang. Yang kedua yaitu tingkat Inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli uang (Putri & Aminda, 2024). Artinya, uang seseorang akan membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini bisa mengurangi tingkat kesejahteraan karena konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Inflasi dapat mengurangi nilai uang dalam tabungan dan investasi.

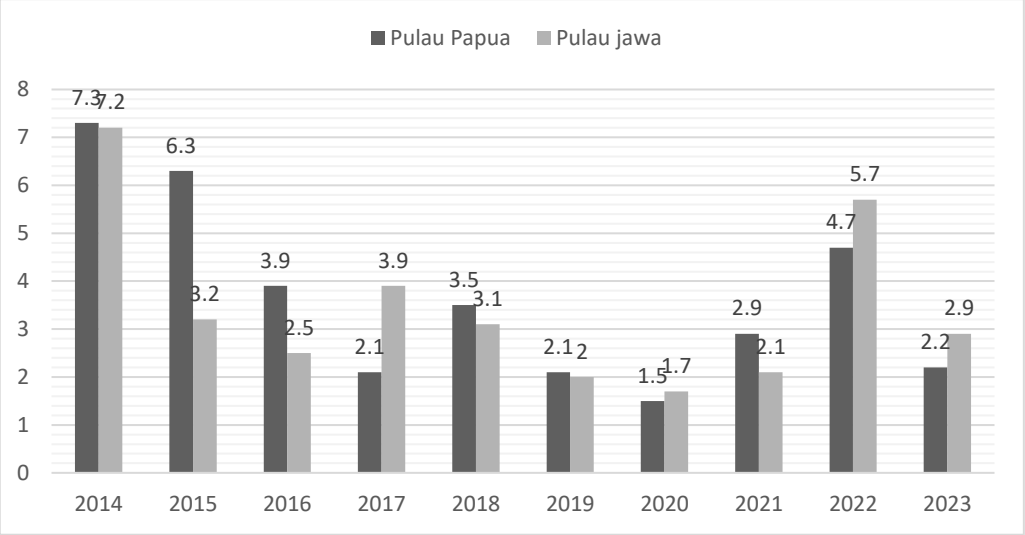

Gambar 2. Rata-rata Inflasi Pulau Jawa dan Papua 2014-2023

Berdasarkan data inflasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat beberapa perbedaan tingkat inflasi antara Pulau Jawa dan Papua. Perbandingan tingkat inflasi antara Pulau Papua dan Pulau Jawa menunjukkan beberapa temuan menarik yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan data yang tersedia, Pulau Papua memiliki nilai tertinggi sebesar 7.3, sedangkan Pulau Jawa berada pada angka 7.2, menunjukkan kedekatan dalam performa. Namun, nilai terendah di Pulau Papua adalah 1.5, yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan nilai terendah Pulau Jawa yang mencapai 1.7. Nilai rata-rata untuk Pulau Papua mencapai 3.86, sedangkan Pulau Jawa berada pada 3.74, mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, Pulau Papua menunjukkan performa yang lebih baik. Selain itu, variasi nilai di Pulau Papua lebih besar, dengan selisih yang signifikan antara nilai tertinggi dan terendah, sementara Pulau Jawa menunjukkan konsistensi nilai yang lebih dekat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Pulau Jawa memiliki

sejumlah nilai tinggi, Pulau Papua memiliki potensi yang lebih variatif, yang bisa menjadi pertimbangan penting dalam analisis lebih lanjut terkait aspek ekonomi, pendidikan, atau sumber daya alam di kedua pulau.

Telah ditemukan beberapa perbedaan yang mencolok antara Pulau Jawa dan Papua terkait masalah ketimpangan yang dapat memengaruhi kesejahteraan. Beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi di Papua masih belum sesuai dengan UUD 1945 tentang memajukan kesejahteraan umum yang berdasar kepada prinsip nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan kesejahteraan yang terjadi di Indonesia dan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan kesejahteraan antara Papua-Jawa di Era Jokowi.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti cenderung menggunakan instrumen terstandar untuk mengumpulkan data dengan memanfaatkan data sekuner. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah gabungan antara data cross section dan time series karena teknik analisis datanya menggunakan data panel (Berlianti et al., 2024).

Populasi penelitian ini yaitu semua provinsi di Pulau Jawa dan Papua sebanyak 8 provinsi yaitu provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua dan Papua barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Sampling Probabilitas, dengan Teknik Stratified Random Sampling. Hal ini dapat menjamin representativitas sampel dari masing-masing provinsi dan memberikan estimasi yang lebih akurat karena memperhitungkan karakteristik setiap populasi serta dapat meningkatkan efisiensi statistik dengan mengurangi varian estimasi (Arieska & Herdiani, 2018). Beberapa poin yang membantu peneliti dalam penentuan sampel adalah mengetahui kelayakan provinsi di Papua dan Pulau Jawa sebagai sampel yang mewakili kedua wilayah tersebut, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing provinsi dalam hal tingkat kesejahteraan serta membandingkan secara akurat dari semua populasi yang dapat memastikan bahwa sampel yang dipilih benar-benar akurat. Teknik ini dapat dilakukan dengan membagi populasi menjadi sub kelompok (strata) berdasarkan provinsi pada setiap pulau. Jumlah sampel yang diambil adalah provinsi Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah model data panel dengan menggunakan uji chow, uji hausman dan uji LM, pengujian asumsi klasik yaitu uji heterokedastisitas dan pengujian hipotesis yaitu uji t, uji F dan uji koefisien determinan (Candra & Irmeilyana, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Rata-rata IW, IPM dan Inflasi 2014-2023

Provinsi	IW	IPM	Inflasi(%)
Papua	0.5176	59.674	3.933
Jawa Barat	0.7059	71.377	3.583
Jawa Tengah	0.6507	71.183	3.531
Jawa Timur	0.9714	71.062	3.594

Sumber: (Data diolah, 2025)

Ketimpangan Jawa Timur memiliki ketimpangan tertinggi, sementara Papua memiliki nilai IW yang lebih rendah, menunjukkan potensi untuk distribusi pendapatan yang lebih merata. Kualitas Hidup: IPM yang lebih rendah di Papua menunjukkan tantangan dalam kesehatan dan pendidikan,

yang berkontribusi pada ketimpangan. Stabilitas Harga: Inflasi yang lebih tinggi di Papua dapat memperburuk tantangan ketimpangan yang ada, sedangkan inflasi yang lebih rendah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dapat mendukung kesejahteraan masyarakat (Febriaty et al., 2022).

Tabel 1. Estimasi Model Data Panel

Keterangan	Model	statistic	sig	Terpilih
Uji Chow	CEM,FEM	101.165840	0.0000	FEM
Uji Hausman	FEM,REM	2.568684	0.2764	REM
Uji LM	REM,CEM		0.0000	REM

Sumber: (Data diolah, 2025)

Uji Chow
Nilai Probabilitas > 0.05 = CEM
Nilai Probabilitas < 0.05 = FEM

Dari hasil uji yang telah dilakukan ditemukan nilai hasil signifikan uji chow sebesar 0.0000. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 0.000 < 0.05, sehingga model yang terpilih dan yang paling baik untuk digunakan adalah model *Fixed Effect Model* (FEM) (Maulana & Ichsan, 2022).

Uji Hausman
Nilai Probabilitas > 0.05 = REM
Nilai Probabilitas < 0.05 = FEM

Dari hasil uji yang telahh dilakukan ditemukan nilai hasil signifikan uji hausman sebesar 0.2764. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 0.2764 > 0.05, sehingga model yang terpilih dan yang paling baik untuk digunakan adalah model *Random Effect Model* (REM)

Uji Legrange Multiplier
Nilai Probabilitas > 0.05 = CEM
Nilai Probabilitas < 0.05 = REM

Dari hasil uji yang telah dilakukan ditemukan nilai hasil signifikan uji hausman sebesar 0.0000. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 0.000 < 0.05, sehingga model yang terpilih dan yang paling baik untuk digunakan adalah model *Random Effect Model* (REM).
Hasil Uji Asumsi klasik dan Uji Hipotesis

Tabel 2. Pengaruh IPM dan Inflasi terhadap Ketimpangan Wilayah

Variabel Independen	**TH**	**β**	**T_{hitung}**	**VIF**	**Sig**
IPM	-	0.020402	4.754854	-0.203835	0.0000
INFLASI	+	0.008906	0.775430	1.00000	0.4430
Konstanta					-0.715148
F_{hitung}					0.000146
F_{tabel}					3.25192
T_{tabel}					2.02437
Adjusted R2					0.346162
N					40

Sumber: (Data diolah, 2025)

Uji Multikolinearitas

Model yang terpilih adalah REM, maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah Multikolinearitas. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas (Basuki, 2021). Koefisien korelasi antara IPM dan Inflasi sebesar -0.203835 dan 1.0000 kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Hipotesis

Uji t

Variabel IPM memiliki nilai t hitung sebesar 4.754854 > t tabel sebesar 2.02439 dengan nilai signifikan sebesar 0.0000 < 0.05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel Inflasi memiliki nilai t hitung sebesar 0.775430 > t tabel yaitu sebesar 2.02439 dengan nilai signifikan sebesar 0.4430 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F

Diketahui F tabel sebesar 3.25196 dengan nilai prob. sebesar 0.000146 < 0.05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen (IPM dan Inflasi) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen (IW) pada tahun 2014-2023.

Uji Adjusted R Square

Diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.346162 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 34.65%. Sedangkan sisanya sebesar 65.35 dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini. Adapun beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan wilayah yaitu akses pendidikan, kesehatan, ketersediaan infrastruktuk, dan pekerjaan (Andina et al., 2019).

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Williamson

Dari hasil uji data panel terdapat dua kategori yaitu hubungan umum dan individu. Persamaan umum menunjukkan bahwa Indeks Williamson (IW) dipengaruhi oleh dua variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan inflasi (INFLASI). Koefisien untuk IPM adalah negatif (-0.003437), menunjukkan bahwa peningkatan IPM berhubungan dengan penurunan IW. Ini berarti bahwa ketika kualitas hidup (yang diukur oleh IPM) meningkat, ketimpangan wilayah dalam distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung menurun. Koefisien untuk inflasi adalah positif (+0.000653), menunjukkan bahwa peningkatan inflasi berhubungan dengan peningkatan IW. Hal ini dapat diartikan bahwa inflasi, dalam konteks ini, berkontribusi pada peningkatan ketimpangan.

Kenaikan harga barang dan jasa dapat berdampak lebih besar pada kelompok berpenghasilan rendah, sehingga memperburuk ketimpangan. Sedangkan perbandingan individu antar provinsi yaitu Indeks Williamson Jawa Barat (0.93882) dan Indeks Williamson Jawa Timur (1.212051) menunjukkan nilai IW yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Williamson Papua (0.721164) dan Indeks Williamson Jawa Tengah (0.43829). Ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di Jawa Barat dan Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan Papua dan Jawa Tengah. Indeks Williamson Jawa Tengah memiliki nilai terendah, yang menunjukkan potensi ketimpangan yang lebih rendah. Ini bisa mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Jawa Tengah lebih merata dibandingkan dengan provinsi lain.

Berdasarkan penelitian ini, hasil menunjukan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Williamson. Variabel IPM memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 < 0.05. Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa IPM dapat menjadi jaminan dalam permasalahan ketimpangan wilayah khususnya antara Provinsi Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 2014-2023. Walaupun indikator IPM dikembangkan sebagai pengukuran alternatif dalam melihat kondisi pembangunan manusia yang baik, namun variabel ini tidak menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula. ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM akan berkontribusi pada penurunan IW. Artinya, semakin tinggi kualitas hidup (dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pendapatan), semakin merata distribusi pendapatan dalam masyarakat. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bhagaskara dan Araja (Araja et al., 2020). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) memiliki pengaruh yang signifiakan terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian penelitian Nilasari dan Amalia pada penelitiannya juga mendapatkan hasil yang sama yaitu IPM berpengarauh signifikan terhadap ketimpangan wilayah (Nilasari & Amelia, 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak positif dalam mengurangi ketimpangan yang diukur oleh Indeks Williamson. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan IPM harus menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari awal pemerintahan Jokowi hingga kini, perbandingan antara Provinsi Papua dan provinsi-provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Indeks Williamson (IW). Papua meskipun mengalami upaya peningkatan IPM, tetap memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan ketiga provinsi di Jawa. Akses terbatas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi tantangan utama, meskipun IW-nya yang lebih rendah mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Di sisi lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan IPM yang lebih tinggi, mencerminkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, nilai IW yang lebih tinggi di provinsi-provinsi ini menunjukkan ketimpangan yang lebih signifikan, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di daerah tertentu.

Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Williamson

Variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dan mempunyai arah positif terhadap ketimpangan wilayah antara Provinsi Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.4430 < 0.05. Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh ekonom Milton Friedman yang berpendapat bahwa inflasi lebih terkait dengan faktor moneter dan tidak selalu berkorelasi langsung dengan ketimpangan antar wilayah (Arafah, 2016). Meskipun tidak signifikan, arah positif dalam pengaruh inflasi terhadap IW mengindikasikan bahwa, secara teori, peningkatan inflasi cenderung berhubungan dengan peningkatan ketimpangan. Ini berarti bahwa ketika inflasi naik, ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga cenderung meningkat, meskipun hubungan ini tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan.

Ketidakberdayaan inflasi untuk menunjukkan pengaruh signifikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Karakteristik Ekonomi Daerah (Meiriza et al., 2024). Ada faktor-faktor lokal yang mengimbangi efek inflasi, seperti subsidi atau program bantuan sosial yang dapat mengurangi dampak inflasi terhadap kelompok berpenghasilan rendah. Kemudian variabilitas data tingkat inflasi yang bervariasi di berbagai provinsi mungkin tidak cukup mempengaruhi ketimpangan secara keseluruhan. Selain itu penelitian ini sesuai dengan penelitan yang dilakukan

oleh Putri dan Aminda dalam penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan wilayah (Putri & Aminda, 2024).

Inflasi tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur karena beberapa alasan. Pertama, inflasi dapat mempengaruhi semua lapisan masyarakat secara serupa, sehingga dampaknya tidak selalu menciptakan ketimpangan yang lebih besar. Kedua, perbedaan dalam struktur ekonomi dan sumber daya di masing-masing provinsi dapat mengurangi pengaruh inflasi terhadap ketimpangan; misalnya, provinsi dengan basis ekonomi yang lebih beragam mungkin lebih mampu beradaptasi dengan perubahan harga. Ketiga, adanya program pemerintah dan intervensi sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dapat membantu menetralkan efek inflasi.

Perbandingan ketimpangan wilayah antara Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Papua Tahun 2014-2023

Data yang disajikan mencerminkan Indeks Williamson (IW), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat inflasi di beberapa provinsi di Indonesia. Provinsi Papua menunjukkan IW sebesar 0.5176 dan IPM sebesar 59.674, yang menunjukkan tantangan dalam pembangunan manusia. Sebaliknya, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki IW yang lebih tinggi, masing-masing 0.7059, 0.6507, dan 0.9714, serta IPM yang lebih baik, di atas 71. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa cenderung lebih maju dalam aspek pembangunan manusia dibandingkan dengan Papua.

Tingkat inflasi bervariasi di antara provinsi, dengan Papua mencatat inflasi tertinggi sebesar 3.933%, sedangkan Jawa Tengah mencatat inflasi terendah sebesar 3.531%. Perbedaan dalam inflasi ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di masing-masing provinsi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan dan tantangan ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif.

Berdasarkan kategori Indeks Williamson (IW), semua provinsi yang dianalisis yaitu Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masuk dalam kategori ketimpangan tinggi, dengan nilai IW antara 0,5176 (Papua), 0,6504 (Jawa Tengah), 0,7059 Jawa Barat dan 0,9714 (Jawa Timur). Papua menunjukkan ketimpangan yang paling rendah di antara provinsi tersebut, sedangkan Jawa Timur memiliki nilai tertinggi, meskipun semuanya mencerminkan ketimpangan yang tidak merata. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan wilayah di Indonesia, terutama di provinsi yang dianalisis, cukup signifikan dan memerlukan perhatian dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang lebih adil.

Kebijakan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah juga lebih terasa di pulau Jawa, dengan proyek-proyek besar yang meningkatkan konektivitas, sementara Papua masih memerlukan perhatian lebih dalam hal pembangunan (Tambaip et al., 2023). Program-program peningkatan IPM di Jawa berjalan lebih cepat, namun dampak inflasi yang positif terhadap IW di Jawa menunjukkan bahwa kenaikan harga dapat meningkatkan ketimpangan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Dengan demikian, meskipun Papua menunjukkan IW yang lebih rendah, tantangan dalam meningkatkan IPM dan kualitas hidup masih ada. Sebaliknya, provinsi-provinsi di Jawa, meskipun memiliki IPM yang lebih baik, namun menghadapi masalah ketimpangan yang lebih besar. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan inklusif diperlukan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di kedua wilayah ini, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijabarkan, penelitian mengenai ketimpangan kesejahteraan anatara Papua-Jawa di Era Jokowi memperoleh kesimpulan yaitu Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai koefisien sebesar 0.020402 dengan tingkat signifikansi 0.0000. IPM menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan ketimpangan wilayah antara Provinsi Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam ketimpangan kesejahteraan antara Papua-Jawa di era Jokowi. Variabel IPM mempengaruhi ketimpangan wilayah secara signifikan. Kemudian Inflasi memiliki nilai koefisien sebesar 0.008906 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.4430. Inflasi tidak menjadi faktor yang menyebabkan kenaikan ketimpangan wilayah antara Provinsi Papua, jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam penelitian ketimpangan kesejahteraan antara Papua - Jawa di era Jokowi. Variabel inflasi tidak mempengaruhi ketimpangan ketimpangan secara signifikan namun searah positif dengan ketimpangan wilayah. Jika tingkat inflasi mengalami peningkatan maka indeks williamson atau ketimpangan wilayah juga akan meningkat (Nur Yusuf, 2019).

SARAN

Dari kesimpulan di atas dapat menarik beberapa saran terkait peran masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan secara khusus pada daerah yang tertinggal. Pemerataan kesejahteraan dapat dilakukan dengan melihat nilai Indeks Pembangunan Manusia yang lebih baik serta tingkat inflasi yang lebih stabil secara menyeluruh di semua titik. Kemudian kepada akademisi untuk penelitian lebih lanjut diharapkan lebih memperluas cakupan area penelitian dan pemilihan variabel baru untuk mencapai hasil yang lebih berpengaruh terhadap variabel dependen penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Andina, T. S., Nikensari, S. I., & Nurjanah, S. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan , Kesehatan , dan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, *7*, 101–111.

Anis Kurnianingsih, Sudati Nur Sarfiah, G. J. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2019. *Dinamic: Directory Journal of Economic*, *3*(1), 120–136.

Arafah, A. (2016). *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan*. 1–23.

Araja, F. H., Sasana, H., & Jalunggono, G. (2020). Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Bekasi Analysis of Income Level in Bekasi District 1). *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, *2*(3), 685–699.

Arieska, P. K., & Herdiani, N. (2018). Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif. *Jurnal Statistika*, *6*(2), 166–171. https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/statistik/article/view/4322/4001

Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *PT Rajagrafindo Persada*, 1–161.

Berlianti, D. F., Abid, A. Al, & Ruby, A. C. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*(3), 1861–1864.

Candra, S. F., & Irmeilyana, I. (2024). Model Regresi Data Panel pada Pengaruh Faktor Curah Hujan Terhadap Produksi Kopi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2021. *Jurnal Penelitian Sains*, *26*(1), 30. https://doi.org/10.56064/jps.v26i1.916

Dr. Agus Irianto Sumule, Dr. James Moudow, Dr. Lily Bauw, S. H. . M. H., Dr. Machfud Sidik, M. S. N. M., & Dr.Tengku Munawar Chalil, S. T. . M. P. (2022). *Kajian Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berkualitas Pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengahdi Provinsi Papua*.

Emmanuel Sujatmoko. (2014). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, *7*(1), 182–211. https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID-hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendid.pdf

Febriaty, H., Rahayu, S. E., & Nasution, E. Y. (2022). Peran Inklusi Keuangan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *13*(1), 125–135. https://doi.org/10.33059/jseb.v13i1.3297

Liebig, S. (2012). Richard Wilkinson and Kate Pickett (2009): The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Allen Lane, London. *Social Justice Research*, *25*(1), 102–107. https://doi.org/10.1007/s11211-012-0148-9

Maulana, I., & Ichsan. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi JAIE*, *1*(2), 61–74.

Meiriza, M. S., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). Teori Ekonomi Keynesian Mengenai Inflasi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Modern. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(2), 2433–2445.

Muhammed Wahed, Sishadiyati, N. I. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Kajian dan Studi Empiris*.

Nilasari, A., & Amelia, R. (2022). Pengaruh PDRB Per Kapita , Indeks Pembangunan Manusia , dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Perkembangan Rasio Gini Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, *2*(2), 171–182.

Nur Yusuf, B. (2019). Unikom_Bobby Nur Yusuf_10.Bab Ii. *Junal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*, 8–27.

Nursaid, A. (2020). *KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR PROVINSI DI PULAU SULAWESI PERIODE 2010 – 2018 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1441 H / 2020 M*.

Putri, D. Y., & Aminda, R. S. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Of Development Economic and Digitalization*, *3*(1), 87–108. https://ejournal.upnvj.ac.id/jded/article/view/7667

Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke. *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* , *6*(1), 97–107.